

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini, membuat kemajuan teknologi berkembang sangat cepat. Dengan berkembangnya teknologi ini sehingga berdampak kepada segala aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu aspek teknologi dimana seiring dengan perkembangan zaman teknologi terus melahirkan inovasi-inovasi baru seperti inovasi Sistem Informasi yang sangat banyak digunakan untuk kegiatan operasional pada saat ini.

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi yang mana di dalam sistem tersebut terdapat orang-orang, teknologi informasi serta prosedur yang telah ditetapkan. Pada saat ini, segala aktivitas tidak dapat terlepas dari sistem informasi. Sistem Informasi telah dihadirkan dalam bentuk media yang beraneka macam bentuk seperti *laptop*, *komputer*, *smartphone*, *televisi* dan jenis lainnya. Sistem informasi dapat meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kegiatan instansi. (Kadir, 2014)

Pada dasarnya manusia dalam dunia kerja tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi, akan meningkatkan *accessibilities* kerja secara efektif dan efisien dalam pengguna sistem, baik menggunakan informasi secara pribadi maupun menggunakan sistem untuk non pribadi, setiap pegawai di instansi dalam melaksanakan kerjanya memiliki layanan yang didapatkan untuk meningkatkan kinerja bagi pegawai tersebut. Layanan ini tidak hanya diberikan kepada pelanggan

atau orang di luar instansi itu tetapi juga diberikan kepada sumber daya manusia yang mengelola segala kegiatan yang ada pada instansi itu, agar pegawai dapat meningkatkan kinerja yang mereka miliki.

Menurut Laudon (2019), Sistem Informasi merupakan sebagai komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, serta menampilkan informasi dalam proses mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisis dan visualisasi pada sebuah organisasi. Penerapan informasi pada instansi dapat meningkatkan kinerja karyawan, sehingga Pengembangan kinerja yang tertata akan membangun pekerjaan menjadi lebih sehat dan berkembang.

Sistem informasi akan mempermudah pekerjaan, banyaknya data atau informasi yang harus dikelola tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan cara yang manual. Maka diperlukan suatu alat bantu yang memiliki tingkat kecepatan dalam perhitungan, pencarian dan penyimpanan data yang tinggi. Alat bantu yang dimaksud dapat berupa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), oleh karena itu sistem informasi pekerjaan tersebut akan berjalan lebih cepat tidak hanya itu penyebaran informasi akan mudah diakses dengan kecanggihan teknologi yang sudah berkembang.

Di Indonesia sendiri untuk melaksanakan pekerjaan pada instansi baik instansi swasta maupun pemerintahan sudah memanfaatkan teknologi dengan berbagai jenis teknologi yang diterapkan, sebagai instansi ada yang menggunakan sistem informasi untuk melakukan pekerjaannya dan sebagian ada yang masih

menggunakan cara manual untuk melakukan pekerjaannya. Namun jika pekerjaan masih digunakan dengan metode manual itu akan membuat pekerjaan menjadi lama selesai dan memakan waktu yang cukup lama, dan jika pekerjaan menggunakan sistem informasi maka pekerjaan tersebut akan jadi lebih mudah dan cepat dimana penyebaran informasi akan lebih cepat sampai pada pihak yang bersangkutan. Dengan perkembangan Sistem Informasi tersebut Badan Kepegawaian Negara menciptakan inovasi untuk mengelola data pegawai agar mempermudah pekerjaan.

Berdasarkan data Statistik Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jumlah Aparatur Sipil Negara di Indonesia pada Semester 1 tahun 2023 mencapai 4.282.429 ribu per 30 Juni 2023.



Sumber: (Buku Statistik BKN ASN)

Gambar 1. 1 Data Pegawai ASN Semester 1 2023

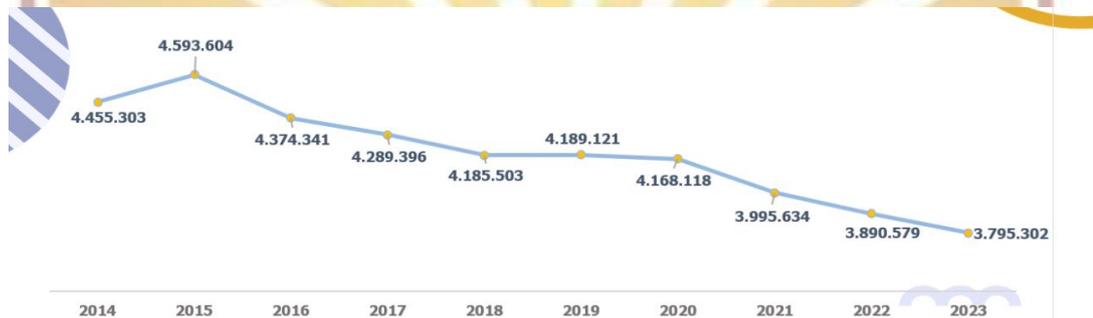
Berdasarkan rincian pada gambar diatas, kondisi pegawai ASN di Indonesia baik pada instansi pusat maupun instansi daerah pada tanggal 30 Juni 2023. Total seluruh pegawai ASN mencapai jumlah 4.282.429 pegawai untuk jumlah ASN saja,

dengan rincian lain jumlah (PNS) dengan presentasi 89% dari jumlah ASN yaitu dengan jumlah 3.79.302 pegawai dan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) sejumlah 487.127 pegawai dengan presentase 11% dari total ASN keseluruhan.

Berdasarkan gambar diatas, dari jumlah (ASN) sebesar 4.282.429 pegawai dengan rincian terdapat jumlah (ASN) yang aktif bekerja baik (ASN) yang bekerja di Instansi Pusat maupun di Instansi Daerah, pada Instansi pusat (ASN) yang aktif bekerja sejumlah 953.487 dengan presentase (22%) dan untuk instansi daerah sebesar 3.328.942 dengan presentase (78%). Dan rincian lainnya yaitu jumlah (ASN) berdasarkan jenis kelamin dimana untuk (ASN) Pria dengan jumlah 1.923.796 dengan presentase (45%) dan untuk (ASN) Wanita sejumlah 2.358.660 dengan presentase (55%).

Sedangkan untuk jumlah Pendidikan itu terbagi atas 3 tingkatan Pendidikan, dimana untuk (ASN) dengan Pendidikan sarjana berjumlah 3.055.855 dengan presentase (71%), untuk (ASN) dengan Pendidikan Diploma berjumlah 639.305 dengan presentase (15%) dan untuk (ASN) yang tamatan SMA sebesar 587.269 dengan presentase (14%) dari total jumlah ASN seluruhnya. Untuk Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan generasi untuk Gen Y dari (1977-1944) berjumlah 2.135.541 (50%), generasi Baby Boomer dari (1946-1964) itu berjumlah 183.721 (4%), Gen Y dari (1965-1976) berjumlah 1.730.658 (40%) dan untuk Gen Z dari (1995-2010) itu berjumlah 235.509 (5%). Dari presentase dan jumlah pegawai berdasarkan generasi diatas dapat kita lihat bahwa untuk generasi yang masih banyak bekerja menjadi pegawai ASN saat Sekarang ini di Indonesia yaitu generasi Y yang mencapai 50% dari jumlah pegawai pada tahun 2023. Dan untuk

generasi yang presentase dan jumlahnya paling sedikit yaitu generasi baby boomer karena sudah banyak yang memasuki usia pensiun dan generasi Z yang di sebabkan generasi Z yang sering keluar dari pekerjaan dan tidak jarang ingin menetap dengan satu pekerjaan yang sudah dimiliki sehingga ini menjadi faktor penyebab jumlah ASN pada generasi Z hanya sekitar 5% dari jumlah ASN keseluruhan di Indonesia.



Sumber: Buku Statistik BKN 2023

Gambar 1 2 Data Pergerakan Jumlah PNS 10 Tahun Terakhir

Pada grafik diatas dapat kita lihat bagaimana pergerakan pegawai PNS setiap tahunnya, terlihat jumlah pegawai PNS yang berstatus aktif dari tahun 2014-2023 berjumlah 3.795.302 atau dapat dikatakan mengalami jumlah pegawai PNS mengalami penurunan sekitar 2% yang dibandingkan dengan jumlah pegawai PNS pada 31 Desember tahun 2022. Untuk jumlah pegawai PNS itu meningkat pada tahun 2015 dengan jumlah 4.593.603 dan tahun berikutnya mengalami penurunan sampai pada tahun 2023.

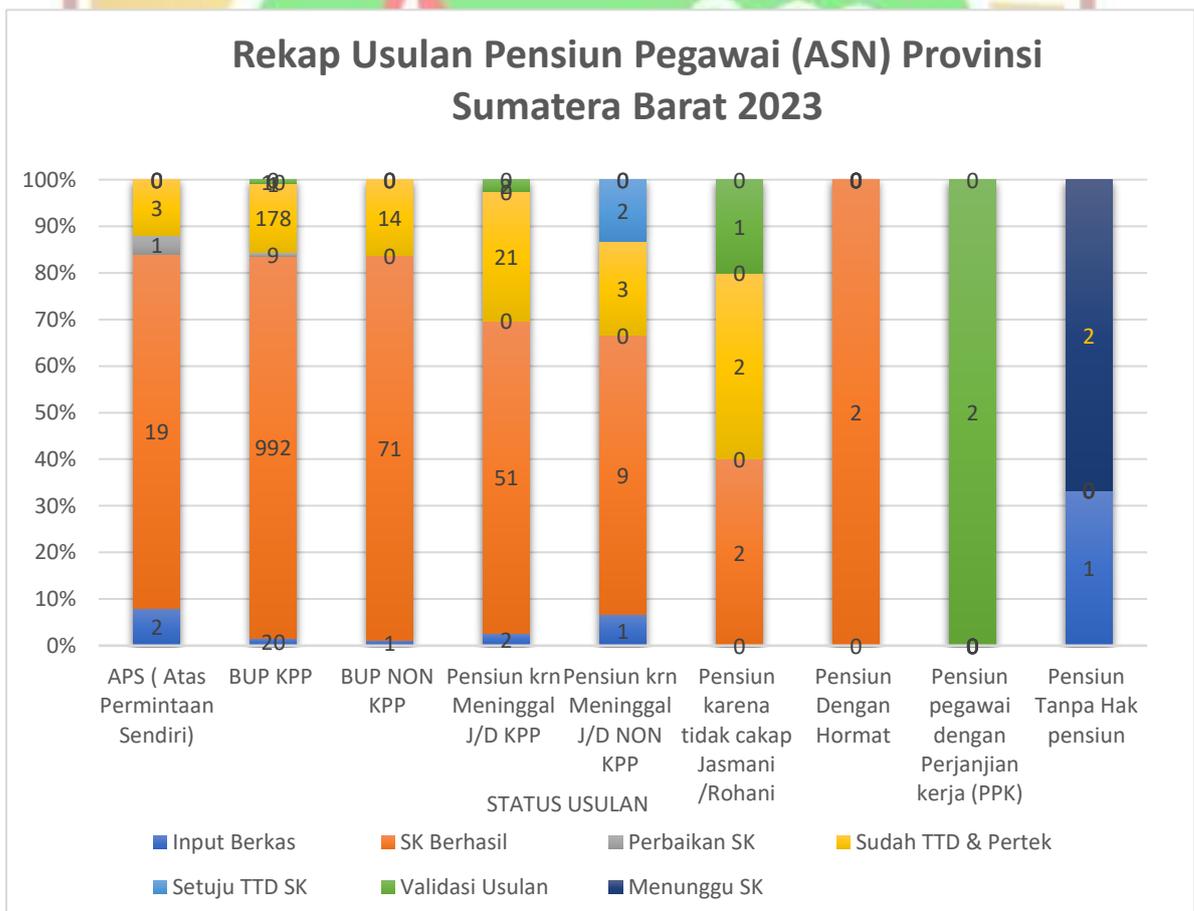
Berdasarkan data dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang kadang mengalami kenaikan dan bahkan beberapa tahun mengalami penurunan untuk mempermudah kegiatan mengelola data pegawai PNS. Untuk itu Badan Kepegawaian Negara (BKN) menciptakan sebuah inovasi dengan memanfaatkan

sistem informasi yang ada dengan mengembakan sebuah Aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Sistem ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara dari aplikasi sebelumnya yaitu Aplikasi MYSAPK, disempurnakan dengan menambah inovasi baru menjadi SIASN. Yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan dalam manajemen data pegawai saat ini, baik digunakan di instansi pusat maupun instansi daerah.

Web ini disediakan untuk beberapa pelayanan data pegawai, seperti pelayanan untuk kenaikan pangkat pegawai, pelayanan mutasi, dan pelayanan untuk usulan Pensiun atau disebut dengan layanan pemberhentian. Badan Kepegawaian Negara meyakini bahwa sistem ini akan membantu pekerjaan untuk proses pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien, dan memudahkan bagi pegawai yang akan bertanggung jawab dalam bidang yang disediakan. Untuk sistem ini juga digunakan pada instansi yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu instansi yang menggunakan Sistem Informasi dalam kegiatan Operasional Instansi yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sistem informasi yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ada enam, antara lain SAPK, SIMPEG, E-MUTASI, E-KINERJA, E-OFFICE, dan termasuk sistem terbaru yaitu SIASN. Setiap sistem memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda, semua sistem yang digunakan sudah cukup bagus, semua sistem dapat diakses dengan mudah oleh semua pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, baik operator ataupun yang bekerja bukan dibidang informasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pokok dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah bentuk untuk menyelenggarakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), administrasi Kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, merumuskan kebijakan kesejahteraan ASN serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menanganin kepegawian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu tugas utama yaitu mengelolah data dan informasi kepegawaian, dan penyimpanan, pemeliharaan data serta dokumen kepegawaian.



Sumber: (Aplikasi SIASN)

Grafik 1. 1 Grafik Data Usulan Pensiun Berdasarkan Status Usulan ASN Provinsi Sumatera Barat

Grafik diatas merupakan data pegawai yang sudah mengajukan pensiun berdasarkan dengan status usul dan jenis pensiun yang di ajukan, pada grafik diatas dapat kita lihat untuk status usul pensiun Pembuatan SK yang sudah berhasil berjumlah 1146 orang dimana terdapat pada pensiun BUP KP yang memiliki status SK sudah berhasil dengan jumlah 992 orang. Untuk jumlah pegawai PNS yang mengajukan usul pensiun berdasarkan rekapan data dari seluruh Provinsi Sumatera Barat itu berjumlah (1.424 Pegawai) baik dari instansi pusat maupun instansi daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang Penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam proses Usul Pensiun pada Instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu penulis membuat tugas akhir ini dengan judul: **Penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam Prosedur Pegajuan Usul Pensiun Pegawai pada Badan Kepegawaian Daera Provinsi Sumatera Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa Syarat-syarat dokumen pengajuan usul pensiun SIASN pada Badan kepegawaian daerah provinsi sumatera barat?
2. Bagaimana langkah - langkah Penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negeran SIASN untuk Prosedur Pengajuan Usul Pensiun Pegawai pada badan kepegawaian daerah provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana penerapan SIASN dalam prosedur pengajuan usul pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat?
4. Apa saja kendala serta cara untuk mengatasi penggunaan (SIASN) dalam proses pengajuan usul pensiun pegawai pada badan kepegawaian daerah provinsi sumatera barat?
5. Apa Kelebihan dalam Penggunaan SIASN untuk prosedur pengajuan Usul pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Syarat-Syarat dokumen pengajuan usul pensiun dengan SIASN pada Badan kepegawaian daerah provinsi sumatera barat!
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah penggunaan SIASN untuk prosedur pengajuan usul pensiun pegawai pada badan kepegawaian daerah provinsi Sumatera Barat!
3. Untuk mengetahui bagaiman penerapan SIASN dalam prosedur pengajuan usul pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui apa kendala serta cara untuk mengatasi penggunaan (SIASN) dalam proses pengajuan usul pensiun pegawai pada badan kepegawaian daerah provinsi sumatera barat!
5. Untuk mengetahui apa kelebihan dalam peggunaan SIASN untuk prosedur pengajuan usul pensiun!

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Instansi

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, dalam memperhatikan serta mengukur kinerja karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, serta dapat dijadikan referensi tambahan bagi perusahaan khususnya dalam bidang sistem informasi.

2. Bagi peneliti

Sebagai media untuk menambah wawasan mengenai penggunaan sistem informasi yang digunakan, oleh Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan juga mengetahui seberapa berdampak kinerja baik perusahaan maupun pegawai dalam menggunakan sistem informasi ini.

3. Bagi Universitas

Sebagai evaluasi dan referensi untuk menyempurnakan bahan ajar dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Magang

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan data ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode peninjauan langsung ke tempat dengan mengamati langsung proses yang terjadi sehingga menyimpulkan informasi yang ditemukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan informasi melalui sesi tanya jawab antar pihak pewawancara dengan narasumber. Narasumber dapat berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik pembahasan yang ditanya.

3. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan pengumpulan data dengan menggunakan buku atau sumber bacaan lainnya yang sesuai dengan topik permasalahan yang diambil untuk melengkapi data lapangan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis bahas, penulis memilih Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Batang Antokan No. 4, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Lama waktu magang yang akan dilaksanakan oleh penulis selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun bentuk sistematika penulisan secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis akan menjelaskan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penelitian, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab 2 ini penulis akan menjelaskan tinjauan teoritis yang memuat teori-teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku yang menjadi pedoman lain yang relevan dengan judul yang diangkat penulis.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab 3 penulis menguraikan tentang kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti sejarah, visi, misi dan core value, tugas dan fungsi pokok, struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas unit kerja

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab 4 penulis menjelaskan tentang bagaimana Penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam Prosedur Pengajuan Usul Pensiun Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, langkah - langkah penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam Prosedur Pengajuan Usul Pensiun Pegawai serta Kendala dan cara Mengatasi Penerapan (SIASN) dalam Prosedur Pengajuan Usul Pensiun Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bab 5 berisikan kesimpulan dari hasil magang dan saran dari penulis untuk lembaga dan penelitian lainnya yang didasarkan pada data penelitian.

